Pemahaman penanganan tindak pidana pemilu dan penyelesaian sengketa hasil pemilu memiliki aturan hukum yang ditetapkan oleh negara, pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemilu, sesuai dengan kewenangan yang diberikan seperti GAKKUMDU, Bawaslu, lembaga PTUN dan MK, artinya para pihak yang bersengketa, termasuk partai politik, diharapkan dapat menyelesaikan pada koridor yang tepat untuk membangun konstitusi dalam rangka mewujudkan cita-cita negara hukum dan demokrasi. demi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat.

Dalam buku ini terdapat pembahasan tentang tahapan dalam penyelesaian sengketa pemilu yang tentunya akan menambah wawasan pembaca tentang apa dan bagaimana proses penyelesaian sengketa pemilu

Penanganan Pelanggaran Pemilu - Kajian Hukum Pidana dan Administrasi

Penanganan Pelanggaran Pemilu : Kajian Hukum Pidana dan Administrasi

Penulis:
Usman

Budiarsih, S.H., M.Hum., PhD
Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H

Penanganan Pelanggaran Pemilu - Kajian Hukum Pidana dan Administrasi

PENULIS:

Usman

Budiarsih, S.H., M. Hum., PhD

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H

Penerbit

Penanganan Pelanggaran Pemilu - Kajian Hukum Pidana dan Administrasi

ISBN:978-602-9077-72-8

PENULIS:

Usman

Budiarsih, S.H., M. Hum., PhD

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H

EDITOR:

Dr. Sofyan Hadi, S.H., M.H

PENERBIT:

Untag Press

Jl. Semolowaru 45 Surabaya

Cetakan 1, MEI 2021

Ukuran: 15,5 x 23 cm

Jumlah halaman: v + 107 Halaman.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang Ketentuan Pidana Pasal 112-119, Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dilarang keras menerjemahkan, menfotocopy, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penerbit

Buku ini di Persembahkan Untuk:
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Fakultas Hukum 17 Agustus 1945 Surabaya
Untag Press yang memuat Buku ini
Mahasiswa sebagai Buku Referensi
Para Pembaca yang berminat mempelajari
Tindak Pidana Khusus dan Sengketa Pemilu

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penulisan buku Penanganan Pelanggaran Pemilu - Kajian Hukum Pidana dan Administrasi. Buku ini disampaikan untuk memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu serta bagaimana sebenarnya tahapan dalam penyelesaiannya. Penulis menyadari banyak kekurangan dan keterbatasan sebagai manusia meskipun telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan penulis demi penyelesaian buku refrensi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang berperan dalam penulisan buku ini. Buku ini tidak akan berhasil tercapai bila tanpa bantuan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Penulis berharap buku referensi ini bisa menambah tentang apa saja yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu. Penulis juga berharap semoga buku referensi ini bisa diterima dengan baik dan bisa berguna baik bagi pembaca maupun bagi penulis. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sebagai masukan yang membangun untuk perbaikan kedepannya.

Surabaya, 30 Mei 2021

Tim Penulis

DAFTAR ISI:

I. PENDAHULUAN	1
II. PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM OLEH GAKKUMDU	5
A. Sentra Penegakan Hukum Terpadu	7
1) Asas dan Prinsip Dasar Gakkumdu	8
2) Pembentukan Gakkumdu	8
3) Organisasi Gakkumdu	9
B. Ketentuan Pidana Pemilihan Umum	14
C. Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum	31
III. PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	51
A. Kewenangan Bawaslu Untuk Menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum	51
B. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Melalui Bawaslu	55
IV. SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA	70
A. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk Memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum	71
B. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara	72

V. PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI.....	79
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	80
B. Tata Cara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi.....	82
DAFTAR PUSTAKA	104

I. Pendahuluan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD Tahun 2019 telah usai dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Hasilnya sebanyak 575 orang Anggota DPR, 136 orang anggota DPD (*Pemilihan Umum Legislatif Indonesia*, 2019), 2.207 orang Anggota DPRD Propinsi, 17.610 orang Anggota DPRD Kabupaten/ Kota, dan sedangkan Presiden dan Wakil Presiden yakni Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma'ruf Amin yang diusung koalisi PKB, PKPI, PDIP, Nasdem, Hanura, PP dan Golkar, telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta dan/atau pasangan terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dengan telah berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tersebut, berarti Bangsa Indonesia telah selesai mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis, karena Pemilihan Umum pada dasarnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan, atau dengan kata lain Pemilihan Umum merupakan simbol kedaulatan rakyat.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014, secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi mendorong semua pemangku kepentingan Pemilihan Umum untuk melakukan kodifikasi undang-undang Pemilihan Umum. Putusan tersebut menyatakan, bahwa pemisahan penyelenggaraan Pemilihan Umum legislatif dan Pemilihan Umum presiden tidak konstitusional, sehingga pada Pemilihan Umum 2019, penyelenggaraan dua Pemilihan Umum itu harus diserentakkan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus 2017 serta telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2017 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan dan 4 lampiran.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka undang-undang berikut ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku :

- 1) *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden (Lembaran Negara*

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

- 2) *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);*
- 3) *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);*
- 4) *Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).*

Pemilihan Umum sebagaimana dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemilihan Umum sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat, maka lebih menjamin penyelenggaraan Pemilihan Umum secara teratur per lima tahun ataupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota serta Presiden dan Wakil

Presiden Tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak. Pemilihan Umum dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilihan Umum harus melaksanakan Pemilihan Umum berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Pemilihan Umum dan pengawasannya diatur dengan beberapa peraturan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan pihak terkait, sebagai berikut :

- 1) *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;*
- 2) *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum,*
- 3) *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu., 2018).*

II. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Gakkumdu

Tindak Pemilihan Umum adalah setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang (Prakoso, 1987).

Penanganan tindak pidana Pemilu secara teknis disebut pula dengan ‘Penindakan’ yang merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran (Bambang, 2021) yang berasal dari temuan pengawas Pemilu atau yang berasal dari laporan warga negara Indonesia yang punya hak pilih, laporan peserta Pemilu atau laporan dari pemantau Pemilu untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu, penyidik dan penuntut umum serta diperiksa, diadili dan diputuskan oleh pengadilan (Jurdi, 2018).

Tindak pidana Pemilihan Umum menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa :

“Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”.

Berdasarkan definisi tersebut, perbuatan/tindakan yang dapat dinilai sebagai tindak pidana pemilu adalah perbuatan yang dikriminalisasi berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum (Fahmi, 2016). Sesuai definisi itu, juga dapat dipahami bahwa tindak pidana Pemilihan Umum adalah pelanggaran terhadap suatu kewajiban, hal mana pelanggaran tersebut diancam sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (Topo Santoso, 2006).

Dan menurut Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa :

“Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus :

b. Tindak pidana pemilu yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam), sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu”.

Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan Umum menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, 2017).

Dalam hal putusan pengadilan negeri diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan (Surbakti et al., 2011). Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.

Putusan pengadilan tinggi yang memeriksa dan memutus perkara banding dalam tindak pidana Pemilihan Umum merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain (Wijayanta & Firmansyah, 2018).

A. Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Sentra Penegakan Hukum Terpadu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilihan Umum (Perbawa, 2019), sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa :

“Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilihan Umum yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan

Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri”.

Dan Pasal 486 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu”

1) Asas dan Prinsip Dasar GAKKUMDU

Dalam hal penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Gakkumdu, berdasarkan asas : a) keadilan; b) kepastian; c) kemanfaatan; d) persamaan di muka hukum; e) praduga tidak bersalah; dan f) legalitas. Dan dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. kebenaran;
- b. cepat;
- c. sederhana;
- d. biaya murah; dan
- e. tidak memihak (*Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.*, 2018).

2) Pembentukan GAKKUMDU

Keberadaannya pembentukan Gakkumdu terdiri atas :

- a. Gakkumdu pusat, berkedudukan di Bawaslu;

- b. Gakkumdu provinsi, berkedudukan di Bawaslu Provinsi;
 - c. Gakkumdu kabupaten/kota, berkedudukan di Bawaslu
 - d. Kabupaten/Kota; dan
 - e. Gakkumdu luar negeri, berkedudukan di Panwaslu LN.
- Pembentukan dan penetapan Gakkumdu dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu, setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung. Sedangkan untuk Luar Negeri dilaksanakan dengan berkoordinasi kepada menteri yang membidangi urusan luar negeri (Bambang et al., 2021).

3) Organisasi GAKKUMDU

- a. Keanggotaan Gakkumdu terdiri atas :
 - Pengawas Pemilihan Umum;
 - Penyidik; dan
 - Jaksa.

Anggota Gakkumdu dalam menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum, dan ditetapkan berdasarkan surat perintah tugas dari Kepolisian dan Kejaksaan.

- b. Struktur organisasi Gakkumdu pusat terdiri atas :
 - penasihat Gakkumdu;
 - pembina Gakkumdu;

- koordinator Gakkumdu; dan
- anggota Gakkumdu.

Penasehat Gakkumdu dijabat oleh :

- Ketua Bawaslu;
- Kapolri; dan
- Jaksa Agung.

Pembina Gakkumdu dijabat oleh :

- Anggota Bawaslu;
- Kepala Badan Reserse Kriminal Polri; dan
- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Koordinator Gakkumdu dijabat oleh :

- Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu sebagai Ketua Koordinator Gakkumdu;
- Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri dari unsur Polri; dan
- Direktur Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya dari unsur Kejaksaan.

Anggota Gakkumdu berasal dari Bawaslu, Penyidik pada Badan Reserse Kriminal Polri dan Jaksa Penuntut Umum pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu.

c. Struktur organisasi Gakkumdu Provinsi terdiri atas :

- Penasehat Gakkumdu provinsi;
- Pembina Gakkumdu provinsi;
- Koordinator Gakkumdu provinsi; dan
- Anggota Gakkumdu provinsi.

Penasehat Gakkumdu Provinsi dijabat oleh :

- Ketua atau Anggota Bawaslu Provinsi;
- Kapolda; dan
- Kajati.

Pembina Gakkumdu Provinsi dijabat oleh :

- Anggota Bawaslu Provinsi yang ditunjuk;
- Direktur Kriminal Umum Polda; dan
- Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi.

Koordinator Gakkumdu Provinsi dijabat oleh :

- Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi sebagai Ketua Koordinator Gakkumdu provinsi;
- Kepala Sub Direktorat Keamanan Negara pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah dari unsur Polri; dan
- Koordinator pada Kejaksaan Tinggi dari unsur Kejaksaan.

Anggota Gakkumdu provinsi berasal dari Bawaslu Provinsi, Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi.

d. Struktur organisasi Gakkumdu Kabupaten/ Kota terdiri atas :

- Penasehat Gakkumdu Kabupaten/ Kota;
- Pembina Gakkumdu Kabupaten/ Kota;
- Koordinator Gakkumdu Kabupaten/ Kota; dan
- Anggota Gakkumdu Kabupaten/ Kota.

Penasehat Gakkumdu Kabupaten/ Kota dijabat oleh :

- Ketua atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Kapolres Metro/Kapolres Kota Besar/Kapolres Kota/Kapolres; dan
- Kepala Kejaksaan Negeri.

Pembina Gakkumdu Kabupaten/ Kota dijabat oleh :

- Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Wakil Kapolres Metro/Polres Kota Besar/Polres Kota/ Polres; dan
- Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri.

Koordinator Gakkumdu Kabupaten/ Kota dijabat oleh :

- Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu kabupaten/kota;
- Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Polres Metro/Polres Kota Besar/Polres Kota/Polres; dan
- Kepala Subseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri.

Anggota Gakkumdu kabupaten/kota berasal dari Bawaslu Kabupaten/Kota, Penyidik pada Satuan Reskrim Polres Metro/Polres Kota Besar/Polres Kota/Polres dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

e. Gakkumdu luar negeri terdiri atas :

- Gakkumdu pusat;
- Panwaslu LN;
- atase Polri atau staf teknis Polri; dan
- Kepala Bidang Kejaksaan di Luar Negeri atau Atase Kejaksaan dan/atau Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan.

Dalam melaksanakan tugasnya Gakkumdu luar negeri membentuk Kelompok Kerja Gakkumdu luar negeri, terdiri atas :

- Gakkumdu luar negeri;
- Pejabat terkait di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan di luar negeri;
- Pejabat terkait di Divisi Hubungan Internasional Polri; dan
- Pejabat terkait di Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan.

f. Sekretariat Gakkumdu melekat pada :

- Sekretariat Jenderal Bawaslu untuk Gakkumdu pusat;
- Sekretariat Bawaslu Provinsi untuk Gakkumdu provinsi;
- Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Gakkumdu kabupaten/kota; dan
- Sekretariat Panwaslu LN untuk Gakkumdu luar negeri.

Sekretariat dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu.

B. Ketentuan Pidana Pemilihan Umum

Jumlah ketentuan pidana yang ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdiri dari 67 (Enam Puluh Tujuh) pasal sebagai berikut (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, 2017):

NO	PASAL	UNSUR	SANKSI
1	488	Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203,	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2	489	Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Pasal 207, dan Pasal 213.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
3	490	Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
4	491	Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu.	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00

			(dua belas juta rupiah).
5	492	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2).	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
6	493	Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2).	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
7	494	Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3).	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
8	495	<p>1. Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa.</p> <p>2. Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa.</p>	<p>1. dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p> <p>2. dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).</p>

9	496	Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3).	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
10	497	Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
11	498	Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan.	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
12	499	Setiap anggota KPPS/ KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (2) dan Pasal 363 ayat (2).	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
13	500	Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 ayat (2).	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
14	501	Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda

		Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS.	paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
15	502	Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
16	503	Setiap anggota KPPS/ KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (3) dan Pasal 362 ayat (3) dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (3).	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
17	504	Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (4).	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
18	505	Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
19	506	Setiap anggota KPPS/ KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda

		pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/ Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (2) dan ayat (3).	paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
20	507	<p>1. Setiap Panwaslu Kelurahan/Desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (6).</p> <p>2. Setiap Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (7).</p>	<p>1. dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p> <p>2. dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p>
21	508	Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391.	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
22	509	Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2).	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
23	510	Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak

			Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
24	511	Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
25	512	Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2).	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
26	513	Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (5).	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
27	514	Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara	dipidana dengan pidana penjara paling

		yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).	lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
28	515	Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
29	516	Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
30	517	Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
31	518	Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

		calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.	
32	519	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
33	520	Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
34	521	Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
35	522	Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

		badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan/atau deputy gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3).	dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
36	523	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j. 2. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2). 3. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). 2. dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). 3. dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
37	524	1. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal	1. dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda

		<p>KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu.</p> <p>2. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu</p>	<p>paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</p> <p>2. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).</p>
38	525	<p>1. Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (1).</p> <p>2. Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (2).</p>	<p>1. dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>2. dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>
39	526	<p>1. Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan</p>	<p>1. dipidana dengan pidana penjara</p>

		<p>usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (1).</p> <p>2. Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (2).</p>	<p>paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>2. dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>
40	527	<p>Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1).</p>	<p>dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).</p>
41	528	<p>1. Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2) dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara.</p> <p>2. Pelaksana dan tim kampanye yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2).</p>	<p>1. dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.</p> <p>2. dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.</p>
42	529	<p>Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh</p>	<p>dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling</p>

		KPU untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1).	banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
43	530	Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
44	531	Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
45	532	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
46	533	Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
47	534	Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

48	535	Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4).	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
49	536	Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
50	537	Setiap anggota KPPS/ KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (4) dan ayat (5).	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
51	538	PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 kepada PPK.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
52	539	PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 kepada KPU Kabupaten/Kota.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

53	540	<p>1. Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4).</p> <p>2. Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5).</p>	<p>1. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).</p> <p>2. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).</p>
54	541	Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 ayat (2) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
55	542	Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 ayat (3), anggota KPU	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
56	543	Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

		dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.	
57	544	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
58	545	Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
59	546	Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
60	547	Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
61	548	Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak

		badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4).	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
62	549	Dalam hal KPU kabupaten/ kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (3) sementara persyaratan dalam Undang-Undang ini telah terpenuhi, anggota KPU kabupaten/kota	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
63	550	Setiap pelaksana atau peserta kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
64	551	Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
65	552	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama. 2. Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000, 00 (lima puluh miliar rupiah). 2. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,

		pemungutan suara putaran pertama.	00 (lima puluh miliar rupiah).
66	553	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua. 2. Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua 	<ol style="list-style-type: none"> 1. dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 2. dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
67	554	Dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536	pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

C. Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum

Tata cara penanganan tindak pidana pemilihan umum menurut ketentuan Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa :

“1.Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu l(abupaten/ Kota, dan/ atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu”.

“2.Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.

3.Laporan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat pelapor;*
- b. pihak terlapor;*
- c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan*
- d. uraian kejadian”.*

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 455 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka ditetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Dalam hal Penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan, melakukan penanganan yang berasal dari Temuan atau Laporan yaitu :

- 1) Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/ atau Pengawas TPS pada setiap tahapan;
- 2) Laporan adalah laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilihan Umum, atau pemantau Pemilihan Umum kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Sehubungan hal tersebut diatas Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS wajib melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan Umum (*Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum*, 2018).

Penindakan merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran yang berasal dari Temuan/ Laporan untuk ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang. Proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum meliputi :

- a. Temuan/penerimaan Laporan;

- b. pengumpulan alat bukti;
- c. klarifikasi;
- d. serta penerusan hasil kajian atas Temuan/Laporan
- e. kepada instansi yang berwenang;
- f. pengkajian; dan/atau
- g. pemberian rekomendasi.

Dalam hal melakukan penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum yang berasal dari Temuan dan Laporan yaitu :

1) Temuan

Pengawas Pemilihan Umum yang mendapat tugas untuk melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Hasil pengawasan tersebut yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan Umum disampaikan dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN sebagai Temuan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model B.2 (Temuan). Pada formulir tersebut memuat paling sedikit :

- a. Pengawas Pemilihan Umum yang menemukan dugaan pelanggaran;
- b. batas waktu Temuan;

- c. pihak terlapor; dan
- d. peristiwa dan uraian kejadian.

Dari hasil pengawasan Pengawas TPS terdapat dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum, Pengawas TPS menyampaikan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa. selanjutnya hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa terdapat dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum, Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan.

2) Laporan

Laporan Dugaan Pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dapat disampaikan oleh :

- a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
- b. Peserta Pemilu; atau
- c. Pemantau Pemilu.

Pelapor dalam menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dapat didampingi oleh kuasanya, disertai dengan surat kuasa. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum disampaikan kepada Pengawas Pemilihan Umum paling lama 7 (tujuh) hari

sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum. Laporan yang diterima secara langsung di Kantor Pengawas Pemilihan Umum yang dituangkan dalam formulir model B.1 (Penerimaan Laporan). Formulir penerimaan laporan diisi berdasarkan keterangan Pelapor secara rinci dan lengkap. Dalam mengisi formulir penerimaan Laporan, Pelapor melengkapi dan menyertakan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain. Pelapor menandatangani formulir penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum. Petugas penerima Laporan membuat tanda bukti penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran dalam 2 (dua) rangkap yang dituangkan dalam formulir model B.3 (Tanda Bukti Penerimaan Laporan). Petugas penerima Laporan memberikan 1 (satu) rangkap tanda bukti penerimaan Laporan tersebut kepada Pelapor dan 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilihan Umum.

Adapun dugaan pelanggaran Pemilihan Umum merupakan tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Umum meliputi :

- 1) *Dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum merupakan pelanggaran terhadap etika*

Gambar - 1 : Alur Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum

(Surbakti et al., 2011)

Perlu diketahui bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra

Sehingga pada saat itu dengan segera tata cara dan mekanisme penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum mengacu kepada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Gambar - 2 : Alur Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum

(Surbakti et al., 2011)

1) Penerima Temuan dan Laporan.

Penyidik dan Jaksa mendampingi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN dalam menerima temuan atau laporan tindak pidana Pemilihan Umum. menggunakan format kelengkapan temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilihan Umum. untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan konsultasi terhadap temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilihan Umum. Dalam hal temuan atau laporan diterima, Pengawas Pemilihan Umum membuat dan mengisi format temuan atau laporan serta memberikan nomor dan memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada pelapor. Setelah temuan atau laporan diterima, Pengawas Pemilihan Umum didampingi oleh anggota Gakkumdu sesuai tingkatan melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi yang hadir. Koordinator Gakkumdu sesuai tingkatan menerbitkan surat perintah Penyelidikan setelah temuan atau laporan diterima Pengawas Pemilihan Umum. selanjutnya Penyelidik melakukan Penyelidikan berdasarkan surat perintah Penyelidikan.

2) Pembahasan Pertama

Pengawas Pemilihan Umum bersama dengan Penyidik dan Jaksa paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam melakukan Pembahasan pertama terhitung sejak tanggal temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilihan Umum. Pembahasan tersebut dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu di setiap tingkatan. Hasil Pembahasan tersebut untuk menyimpulkan apakah temuan atau laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiil, dan menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilihan Umum yang telah diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilihan Umum, serta dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan I yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilihan Umum, Penyidik, dan Jaksa. Selanjutnya Berdasarkan hasil Pembahasan tersebut, Pengawas Pemilihan Umum menyusun kajian atas temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilihan Umum. Penyidik dan Jaksa dapat mendampingi Pengawas Pemilihan Umum dalam menyusun kajian

3) Kajian Pelanggaran Pemilihan Umum

Pengawas Pemilihan Umum melakukan kajian terhadap temuan atau laporan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung setelah temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilihan Umum. Dalam penyusunan kajian tersebut Pengawas Pemilihan Umum memerlukan keterangan tambahan, penyusunan keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Dalam melakukan kajian tersebut, Pengawas Pemilihan Umum dapat mengundang pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli untuk dimintakan keterangan dan/atau klarifikasi. Keterangan dan/atau klarifikasi tersebut terlebih dahulu dilakukan dengan pengambilan sumpah/janji yang dituangkan dalam berita acara di bawah sumpah. Dalam meminta keterangan dan/atau klarifikasi tersebut, Pengawas Pemilihan Umum didampingi oleh Penyidik dan Jaksa. Hasil dari proses kajian pelanggaran Pemilihan Umum oleh Pengawas Pemilihan Umum berupa dokumen kajian temuan atau laporan dan Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring dalam proses kajian dan Penyelidikan

tersebut. Setelah melaksanakan Penyelidikan, Penyelidik membuat laporan hasil Penyelidikan.

4) Pembahasan Kedua

Pengawas Pemilihan Umum bersama dengan Penyelidik dan Jaksa melakukan Pembahasan kedua paling lama 14 (empat belas) Hari sejak temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilihan Umum. Pembahasan tersebut dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu sesuai tingkatan untuk membahas kajian Pengawas Pemilihan Umum dan laporan hasil Penyelidikan. Hasil Pembahasan tersebut untuk menyimpulkan temuan atau laporan merupakan tindak pidana Pemilihan Umum atau bukan tindak pidana Pemilihan Umum. Apabila temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilihan Umum berdasarkan kesimpulan, Pembahasan tersebut dinyatakan terdapat dugaan tindak pidana Pemilihan Umum, Pengawas Pemilihan Umum meneruskan penanganan dugaan tindak pidana Pemilihan Umum kepada Penyelidik. Apabila temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilihan Umum berdasarkan Pembahasan tersebut dinyatakan tidak terdapat unsur tindak pidana Pemilihan Umum, Pengawas Pemilihan Umum,

menghentikan penanganan temuan atau laporan. Dari Hasil Pembahasan kedua dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan II yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilihan Umum, Penyidik dan Jaksa.

5) Rapat Pleno Pengawas Pemilihan Umum

Pengawas Pemilihan Umum melaksanakan rapat pleno untuk memutuskan temuan atau laporan ditingkatkan ke tahap Penyidikan atau dihentikan. Rapat pleno tersebut didasarkan pada hasil Pembahasan kedua, kajian Pengawas Pemilihan Umum, dan laporan hasil Penyelidikan. Dalam hal rapat pleno memutuskan temuan atau laporan penanganan pelanggaran Pemilihan Umum dihentikan, Pengawas Pemilihan Umum mengumumkan status temuan atau laporan disertai dengan alasan penghentian dan memberitahukan kepada pelapor. Dalam hal rapat pleno memutuskan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum ditingkatkan pada tahap Penyidikan, Pengawas Pemilihan Umum meneruskan temuan atau laporan kepada Penyidik dan menerbitkan surat perintah tugas untuk melaksanakan Penyidikan. Penerusan temuan atau laporan disertai dengan berkas pelanggaran yang memuat :

- a. surat pengantar;
- b. surat perintah tugas untuk melaksanakan Penyidikan yang dikeluarkan oleh Pengawas Pemilihan Umum;
- c. daftar Isi;
- d. temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilihan Umum;
- e. hasil kajian;
- f. laporan hasil Penyelidikan;
- g. surat undangan klarifikasi;
- h. berita acara klarifikasi;
- i. berita acara klarifikasi di bawah sumpah;
- j. berita acara Pembahasan pertama;
- k. berita acara Pembahasan kedua;
- l. daftar saksi dan/atau ahli;
- m. daftar terlapor;
- n. daftar barang bukti;
- o. barang bukti; dan
- p. administrasi Penyelidikan Gakkumdu dari unsur Polri.

Penerusan temuan atau laporan dilakukan oleh Pengawas Pemilihan Umum ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) didampingi Penyidik dan

Jaksa, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) membuat administrasi penerimaan penerusan Temuan atau Laporan berupa :

- a. laporan Polisi dugaan tindak pidana Pemilu; dan
- b. surat tanda bukti laporan.

6) Penyidikan

Penyidik melakukan Penyidikan setelah diterbitkan surat Perintah Penyidikan oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri. Penerbitan surat Perintah Penyidikan tersebut bersamaan dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Penyidik menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Jaksa. Penyidik melakukan Penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak laporan dugaan tindak pidana Pemilihan Umum yang diteruskan dari Pengawas Pemilihan Umum dan Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring terhadap proses Penyidikan.

7) Pembahasan Ketiga

Penyidik menyampaikan hasil Penyidikan dalam Pembahasan ketiga yang dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri. Pembahasan ketiga tersebut dilakukan selama proses Penyidikan.

Pembahasan ketiga dihadiri oleh Pengawas Pemilihan Umum, Penyidik, dan Jaksa untuk membahas hasil Penyidikan. Penyidik Polri menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Penyampaian hasil penyidikan tanpa kehadiran tersangka tersebut, merupakan kondisi tanpa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka karena tersangka tidak pernah hadir setelah dipanggil secara patut dan tidak ditemukan setelah dilakukan pencarian secara maksimal dalam proses penyidikan. Berkas Administrasi pencarian dan pemanggilan secara patut terhadap tersangka yang tidak diketahui keberadaannya dilampirkan dalam berkas perkara. Pembahasan ketiga menghasilkan kesimpulan dapat atau tidaknya perkara dilimpahkan kepada Jaksa. Hasil Pembahasan ketiga dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan III yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilihan Umum, Penyidik dan Jaksa. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Polri disertai petunjuk tentang hal

yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Penyidik Polri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara tersebut harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum. Pengembalian berkas perkara hasil penyidikan tersebut dari Penuntut Umum kepada Penyidik hanya dilakukan 1 (satu) kali. Setelah berkas perkara diterima Penuntut Umum dan dinyatakan lengkap Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Penyerahan tersebut dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka dan dapat dilakukan di Sekretariat Gakkumdu.

8) Penuntutan

Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik dan surat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh Pembina Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatan. Penuntut Umum membuat rencana dakwaan dan surat dakwaan. Penuntut Umum menyusun rencana Penuntutan dan membuat surat tuntutan serta melaporkan rencana dakwaan dan surat

dakwaan dan/atau rencana tuntutan dan surat tuntutan tersebut kepada Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatan. Surat dakwaan tersebut tembusannya disampaikan kepada Koordinator Gakkumdu.

9) Praperadilan

Dalam hal terdapat permohonan praperadilan baik dalam tingkat penyidikan atau penuntutan maka Pengawas Pemilihan Umum, Penyidik dan/atau Penuntut Umum melakukan pendampingan dan monitoring.

10) Pembahasan Keempat

Setelah putusan pengadilan dibacakan, Penuntut Umum melaporkan kepada Koordinator Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan. Selanjutnya melakukan Pembahasan keempat dipimpin oleh Koordinator dari unsur Kejaksaan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah putusan pengadilan dibacakan. Pembahasan keempat tersebut dihadiri oleh Pengawas Pemilihan Umum, Penyidik dan Penuntut Umum dilaksanakan untuk menentukan sikap Gakkumdu dalam hal :

- a. melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan; atau
- b. melaksanakan putusan pengadilan.

Dalam hal hasil Pembahasan keempat menentukan Gakkumdu melakukan upaya hukum tersebut sebagaimana pada huruf a, Penuntut Umum membuat memori banding dan/atau kontra memori banding paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Jaksa melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan diterima. Pelaksanaan putusan tersebut didampingi oleh Penyidik dan Pengawas Pemilihan Umum. Dalam hal putusan tersebut diucapkan tanpa hadirnya terdakwa, Jaksa :

- a. menyampaikan salinan putusan kepada keluarga terpidana dan/atau penasehat hukumnya serta Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga ditempat terpidana terakhir berada sesuai Kartu Tanda Penduduk terpidana dan/atau identitas terpidana dalam surat dakwaan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diterima oleh Penuntut Umum; dan

- b. mengumumkan putusan tersebut di Pengadilan Negeri tempat perkara tersebut disidangkan.

Masa daluarsa menjalankan pidana terhadap putusan perkara tindak pidana Pemilihan Umum yang diputuskan tanpa kehadiran terdakwa dihitung sejak salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut disampaikan kepada keluarga terpidana dan/atau kuasa hukumnya dan pengumuman atas putusan tersebut di Pengadilan Negeri tempat perkara tersebut disidangkan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 84 dan Pasal 85 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang daluarsa menjalankan pidana.

11) Administrasi Gakkumdu

Administrasi Gakkumdu meliputi dokumen-dokumen yang ada pada proses penerimaan temuan atau laporan, penanganan pelanggaran Pemilihan Umum, Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pihak yang berwenang menerbitkan dan menandatangani administrasi tersebut yaitu Koordinator Gakkumdu.

Penerbitan dan penandatanganan administrasi disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing.

ORIGINAL

III. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum di Bawaslu menurut ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa :

“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dan sengketa Penyelenggara Pemilu sebagai akibat Peserta Pemilu dengan dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”.

Penyelesaian sengketa sebagai suatu rangkaian proses untuk melakukan verifikasi formil, materiil, mediasi antar pihak, dan Adjudikasi atas suatu pengajuan permohonan keberatan terhadap diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Berita Acara dalam setiap tahapan Pemilihan Umum oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

A. Kewenangan Bawaslu Untuk Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu

Kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu menurut ketentuan pada Pasal 95 huruf d dan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:

“Bawaslu berwenang :

d.menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”.

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”.

Menurut ketentuan Pasal 469 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu”.

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian, melaksanakan perintah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUXVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018, dan untuk memenuhi perkembangan serta kebutuhan hukum, maka Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum diatur dengan peraturan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai berikut :

1. *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.*
2. *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.*

3. *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.*
4. *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.*

Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilaksanakan dengan cara Mediasi berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya. Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum dilanjutkan dengan cara Adjudikasi jika melalui Mediasi tidak mencapai kesepakatan. Sengketa proses Pemilihan Umum terjadi karena :

- 12) hak peserta Pemilihan Umum yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilihan Umum lain; atau
- 13) hak peserta Pemilihan Umum yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. berupa surat keputusan dan/atau berita acara.

Keputusan yang tidak dapat dijadikan objek sengketa Proses Pemilihan Umum antara lain :

- a. surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atau Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan tindak lanjut dari penanganan sentra penegakan hukum terpadu atau putusan pengadilan terkait Tindak Pidana Pemilihan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; atau
- c. surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilihan Umum.

Permohonan yang diajukan dengan objek tersebut diatas dinyatakan tidak dapat diregister dan dituangkan menggunakan formulir model PSPP 07 setelah mendapatkan persetujuan dari anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota (*Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang*

Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, 2018).

Mekanisme penyelesaian sengketa antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu dilakukan dengan cara :

- a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. melakukan Mediasi antar pihak yang bersengketa;
- d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antar Peserta Pemilu dilakukan dengan cara :

- a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. melakukan Mediasi terhadap para pihak yang bersengketa; dan
- d. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu apabila tidak tercapai mufakat diantara para pihak yang bersengketa.

Untuk memenuhi kelengkapan berkas administrasi penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antar Peserta Pemilu dengan acara cepat, hasil dari proses tersebut dituangkan dalam formulir-formulir sebagai berikut :

NO	JENIS FORMULIR	KETERANGAN
1	Model PSAP 01	Hasil Penerimaan Permohonan
2	Model PSAP 02	Hasil Verifikasi
3	Model PSAP 03	Hasil Mediasi
4	Model PSAP 04	Hasil Putusan

Penyelesaian sengketa proses Pemilu antar Peserta dapat dilakukan dengan acara cepat. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan acara cepat dilakukan berdasarkan :

- a. permohonan dari peserta Pemilu; atau
- b. pertimbangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan terhadap peristiwa di tempat kejadian.

Pengajuan permohonan oleh Peserta dapat disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan secara lisan atau tertulis. Para Pihak Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum terdiri dari :

PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT (Yang berpotensi dirugikan)
a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah	KPU	Pasangan Calon

mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU;		
b. Partai Politik Peserta Pemilu;		Partai Politik Peserta Pemilu
c. bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;	KPU Provinsi	Calon Anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT
d. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap;		
e. bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;	KPU Kabupaten/Kota	Calon Anggota DPD
f. calon anggota DPD;		
g. bakal Pasangan Calon; dan		Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
h. Pasangan Calon.		

Sebagaimana tabel diatas penjelasannya sebagai berikut :

Pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf g dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon.

Pemohon sengketa proses Pemilihan Umum yang terjadi antar Peserta Pemilihan Umum dapat dimohonkan oleh pelaksana kampanye DPR, DPRD, DPD, dan Pasangan Calon

yang telah terdaftar di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pemohon sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada huruf h dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu terkait laporan dana kampanye dapat diwakili oleh pelaksana kampanye atau tim kampanye.

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum di dalam DCT, calon anggota DPD, atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait. Pengajuan diri sebagai pihak terkait bagi calon anggota DPR dan DPRD melalui Partai Politik.

B. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Melalui Bawaslu

1) Penerimaan Permohonan dan Registrasi

Menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan bahwa :

“1.Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon”.

“2.Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima sejak tanggal Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota”.

3. Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar perubahan hari kerja pada jam 00.00 waktu setempat”.

Untuk memenuhi kelengkapan berkas administrasi penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, maka Bawaslu menetapkan formulir-formulir sebagai berikut :

NO	JENIS FORMULIR	KETERANGAN
1	Model PSPP 01	Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
2	Model PSPP 02	Tanda Terima Berkas
3	Model PSPP 03	Pendaftaran Online Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
4	Model PSPP 04	Permohonan Online Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
5	Model PSPP 05	Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
6	Model PSPP 06	Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Diterima
7	Model PSPP 07	Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Diregister
8	Model PSPP 08	Permohonan Pihak Terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
9	Model PSPP 09	Pemberitahuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait Dapat Diterima

10	Model PSPP 10	Berita Acara Penerimaan Permohonan Pihak Terkait
11	Model PSPP 11	Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
12	Model PSPP 12	Berita Acara Mediasi Mencapai Kesepakatan
13	Model PSPP 13	Putusan Terjadinya Kesepakatan
14	Model PSPP 14	Berita Acara Mediasi Tidak Mencapai Mufakat
15	Model PSPP 15	Jadwal Pelaksanaan Mediasi dan Adjudikasi
16	Model PSPP 16	Panggilan Adjudikasi Pemohon/ Termohon/Saksi/Ahli
17	Model PSPP 17	Jawaban Termohon Terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
18	Model PSPP 18	Panggilan Pihak Terkait
19	Model PSPP 19	Berita Acara Keterangan Saksi
20	Model PSPP 20	Berita Acara Keterangan Ahli
21	Model PSPP 21	Putusan Gugurnya Permohonan
22	Model PSPP 22	Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Permohonan langsung diajukan ke Sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Pemohon menyampaikan dokumen/berkas fisik permohonan secara lengkap, berkas permohonan terdiri dari :

- a. Permohonan Penyelesaian sengketa;
- b. Objek yang disengketakan;
- c. Identitas pemohon dan kuasa hukum;
- d. Surat kuasa khusus;
- e. Bukti dan daftar bukti.

Permohonan tidak langsung diajukan melalui laman penyelesaian sengketa pada laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi layanan online bernama Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS). Pemohon menyampaikan dokumen/berkas fisik permohonan secara lengkap kepada petugas penerima permohonan.

Tenggang waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu :

- a. Permohonan disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan objek sengketa;
- b. Jika berkas permohonan tidak lengkap, petugas menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon agar melengkapi kekurangan berkas paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan disampaikan;
- c. Permohonan yang telah dinyatakan lengkap dicatat dan diberikan nomor permohonan dalam buku register permohonan pada hari yang sama oleh Petugas Penerima Permohonan.

Permohonan belum pernah diregister pada proses penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan penanganan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Dan

Permohonan bukan merupakan sengketa yang terjadi antara calon peserta Pemilu dalam satu Partai Politik.

2) Mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (18) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan bahwa :

“Mediasi atau Musyawarah yang selanjutnya disebut Mediasi adalah proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan”.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses diawali dengan mediasi yang wajib dihadiri oleh pemohon dan termohon, apabila Pemohon tidak menghadiri mediasi setelah dua kali dilakukan pemanggilan secara patut. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan permohonan tersebut menjadi gugur. Dan apabila Termohon tidak menghadiri mediasi setelah dua kali dilakukan pemanggilan secara patut. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan mediasi tidak mencapai

mufakat. Dan penyelesaian sengketa proses dilanjutkan melalui Adjudikasi.

Mediasi yang dilakukan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota diselesaikan paling lama 2 (dua) hari dan dilaksanakan secara tertutup, yang dipimpin paling sedikit 1 (satu) mediator dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dimana permohonan sengketa tersebut diajukan.

3) Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (19) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan bahwa :

“Adjudikasi adalah proses persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu”.

Proses Adjudikasi dilaksanakan apabila proses mediasi tidak mencapai mufakat, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Penyampaian pokok permohonan pemohon;
- b. Jawaban termohon;
- c. Tanggapan pihak terkait;
- d. Pembuktian;

e. Kesimpulan para pihak;

f. Putusan

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk majelis Adjudikasi. Majelis Adjudikasi penyelesaian sengketa Bawaslu dipimpin oleh majelis sidang paling sedikit 3 (tiga) Anggota Bawaslu, terdiri atas 1 (satu) Anggota Bawaslu sebagai ketua majelis sidang dan dibantu oleh 2 (dua) Anggota Bawaslu sebagai anggota majelis sidang.

Majelis Adjudikasi penyelesaian sengketa tingkat provinsi : a) jumlah Anggota Bawaslu Provinsi berjumlah 7 (tujuh) orang anggota, dihadiri sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota Bawaslu Provinsi; dan b) jumlah Anggota Bawaslu Provinsi berjumlah 5 (lima) orang, dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Bawaslu Provinsi.

Majelis Adjudikasi penyelesaian sengketa tingkat kabupaten/kota : a) jumlah Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang anggota, dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; dan b) jumlah Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang, dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Majelis Adjudikasi paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah

Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam hal jumlah anggota bawaslu provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota terdapat kekurangan, majelis Adjudikasi dapat ditambahkan dari Pengawas Pemilu setingkat di atasnya.

4) Putusan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum

Menurut ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan bahwa :

“Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu dibacakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh Pemohon, Termohon, dan pihak terkait”.

Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu dibacakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh Pemohon, Termohon, dan pihak terkait. Putusan paling sedikit memuat :

a. kepala putusan, terdiri atas :

- lambang Garuda;

- nama lembaga;
 - judul Putusan;
 - nomor putusan; dan
 - “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b. identitas Pemohon;
 - c. identitas Termohon;
 - d. pokok permohonan Pemohon;
 - e. jawaban Termohon;
 - f. tanggapan pihak terkait;
 - g. bukti;
 - h. keterangan saksi, ahli, dan/atau lembaga pemberi keterangan;
 - i. kesimpulan Pemohon;
 - j. kesimpulan Termohon;
 - k. pertimbangan hukum;
 - l. pendapat hukum;
 - m. kesimpulan;
 - n. amar Putusan;
 - o. tanggal, bulan, hari dibacakan putusan;
 - p. nama lembaga;
 - q. nama dan tandatangan majelis; dan
 - r. nama dan tandatangan sekretaris.

Pertimbangan hukum pada huruf k disusun dengan memperhatikan antara lain :

- a. kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. kedudukan hukum Pemohon;
- d. tenggang waktu pengajuan Permohonan; dan
- e. pokok permohonan Pemohon.

5) Koreksi Putusan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (21) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan bahwa :

“Koreksi Putusan adalah upaya administratif yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Bawaslu berwenang melakukan koreksi terhadap putusan sengketa proses Pemilu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat kesalahan penerapan hukum dan/atau kekhilafan majelis.

Pemohon yang dirugikan atas putusan sengketa proses Pemilu Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan Koreksi Putusan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dibacakan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Permohonan koreksi terhadap putusan sengketa proses Pemilu paling sedikit memuat :

- a. identitas pemohon;
- b. kedudukan hukum pemohon;
- c. tenggang waktu permohonan;
- d. alasan koreksi permohonan pemohon; dan
- e. hal yang dimohonkan untuk dikoreksi.

Bawaslu menerbitkan hasil koreksi paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal Permohonan koreksi terhadap putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota diterima. Hasil koreksi Bawaslu dapat berupa :

- a. menolak Permohonan koreksi Pemohon; atau
- b. menerima Permohonan koreksi Pemohon.

Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti hasil koreksi dengan menerbitkan putusan baru paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal hasil koreksi diterima oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu

Kabupaten/Kota. Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang bersengketa.

Setelah Putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota atau terhadap putusan koreksi, maka pemohon dapat mengajukan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah upaya administrasi di Bawaslu sudah digunakan.

ORIGINAL

IV. Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata

Usaha Negara

Sengketa proses Pemilihan Umum menurut ketentuan Pasal 470 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa :

“1. Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”.

“2. Sengketa proses Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara :

- a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;*
- b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan*
- c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.*

A. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk Memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum menurut ketentuan Pasal 471 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa :

“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan”.

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa :

“Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”.

Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa :

“1. Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum”.

“2. Pengadilan berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan”.

B. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menurut ketentuan Pasal 471 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa :

“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu”.

Menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa :

“Gugatan sengketa proses Pemilihan Umum diajukan di Pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lama 5 (lima) hari setelah dibacakan putusan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota”.

1) Pendaftaran Gugatan dan Registrasi

Gugatan diajukan secara langsung atau melalui faksimile atau surat elektronik ke pengadilan yang berwenang dengan menyertakan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang digugat dan menyebutkan alamat lengkap termasuk alamat surat elektronik dan telepon penggugat atau kuasanya. Selain diajukan dalam bentuk tertulis, juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam Media Penyimpan Data Elektronik.

Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Penggugat atau Kuasanya yang memuat :

- a. Identitas Penggugat meliputi :
 1. nama;
 2. kewarganegaraan;
 3. tempat tinggal;
 4. pekerjaan Penggugat;
 5. identitas kuasanya apabila diwakili kuasa; dan
 6. alamat surat elektronik dan nomor telepon.
- b. Identitas Tergugat meliputi :
 1. nama jabatan; dan

2. tempat kedudukan.
- c. Penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa;
- d. Kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;
- e. Tenggang waktu pengajuan gugatan;
- f. Alasan-alasan gugatan berupa fakta-fakta dan pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan Tergugat dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- g. Hal-hal yang dapat dimohonkan untuk diputus :
 1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. menyatakan batal keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 3. memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut;
 4. memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Penggugat sebagai partai politik peserta pemilu/ pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden/calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 5. perintah membayar biaya perkara.
- h. Gugatan ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya.

 

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

77

2) Penunjukan Majelis Hakim dan Perbaikan Gugutan

Penunjukan majelis hakim yang memeriksa sengketa proses Pemilihan Umum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan pada hari pendaftaran gugutan dan paling lambat pada hari berikutnya berkas perkara diserahkan kepada majelis hakim yang ditunjuk.

Gugutan yang kurang sempurna dapat diperbaiki dan dilengkapi paling lama 3 (tiga) hari sejak gugutan di register pengadilan. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, penggugat belum menyempurnakan gugutan, majelis hakim memberikan putusan menyatakan gugutan tidak dapat diterima. Putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

3) Pemanggilan dan Penjadwalan Sidang

Pemanggilan para pihak dilakukan oleh kepaniteraan pengadilan melalui surat elektronik, faksimile, surat tercatat dan/atau oleh juru sita pengadilan. Tenggang waktu pemanggilan para pihak paling singkat 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama. Pemanggilan kepada Tergugat dilampiri dengan salinan surat gugutan. Majelis hakim yang ditunjuk mengadili sengketa proses Pemilihan Umum menyampaikan

penetapan tentang jadwal persidangan (court calendar) pada hari sidang pertama dan memerintah kepada para pihak untuk mematuhi. Jadwal persidangan (court calendar) bersifat mengikat bagi para pihak.

4) Persidangan

Persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum. tahapan persidangan :

- a. Pembacaan gugatan;
- b. Jawaban;
- c. Pembuktian; dan
- d. Putusan.

5) Pembuktian

Jenis alat bukti adalah :

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan ahli;
- d. Pengakuan para pihak;
- e. Pengetahuan hakim; dan
- f. Alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.

Majelis hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta alat bukti yang akan digunakan

dalam proses pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti berdasar keyakinan hakim.

Majelis hakim melakukan pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

6) Putusan

Majelis hakim memutus sengketa proses Pemilihan Umum paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Salinan putusan diberikan kepada para pihak yang hadir pada hari pengucapan putusan. Panitera memberitahukan putusan pada hari pengucapan putusan tersebut kepada pihak yang telah hadir di persidangan.

Putusan pengadilan tata usaha negara bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali. KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

V. PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, menyatakan bahwa :

“Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat PHPU adalah perselisihan antara peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional”.

Menurut Pasal 1 angka 9, 10, dan 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Presiden Dan Wakil Presiden, menyatakan bahwa :

“9. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional”.

“10. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPD adalah perselisihan antara perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional”.

“11. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah perselisihan antara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional”.

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum menurut ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Menurut ketentuan Pasal 474 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa :

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”.

Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu. Sedangkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum yang dibatasi oleh waktu yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi untuk Perkara Perselisihan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Pemilu Legislatif sebagaimana yang diatur pada Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam kewenangan ini, maka Mahkamah Konstitusi telah memutus baik perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden maupun PHPU Legislatif tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundangan yang ada bahkan lebih cepat. Waktu yang digunakan untuk penanganan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden yaitu selama 12 Hari Kerja sejak dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (11 Juni sampai dengan 27 Juni 2019). Sedangkan untuk penanganan perkara PHPU Legislatif rata-rata adalah 28 Hari Kerja (1 Juli sampai dengan 6, 7, 8 dan 9 Agustus 2019) yang juga lebih cepat dari batas waktu yang diberikan oleh undang-undang.

B. Tata Cara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi

Tata cara penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Dalam hal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terdiri atas tahapan :

- a. Pengajuan Permohonan Pemohon;
- b. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon;
- c. Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon;
- d. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK;
- e. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait dan Pemberitahuan Sidang kepada Para Pihak;
- f. Pemeriksaan Pendahuluan;
- g. Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan;
- h. Pemeriksaan Persidangan;
- i. Rapat Permusyawaratan Hakim;
- j. Sidang Pengucapan Putusan; dan
- k. Penyerahan salinan Putusan dan Pemuatan Putusan dalam laman (website).

Tahapan sebagaimana dimaksud dikecualikan pada huruf b dan c terhadap penanganan PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

Form dan Akta Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD

MAHKAMAH

NO	NAMA FORM / AKTA
1	Buku Pengajuan Permohonan Pemohon (BP3)
2	Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)
3	Daftar Pemeriksaan Kelengkapan Pengajuan Pemohon (DPKP3)

PEMOHON

NO	NAMA FORM / AKTA
1	Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3)
2	Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL)
3	Akta Pembatalan Penerimaan Permohonan Pemohon (AP4)
4	Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon (DKPP)
5	Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (DKBP)
6	Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK)
7	Akta Pembatalan Registrasi Perkara (APRP)
8	Tanda Terima Tambahan Berkas (T3B)
9	Lampiran Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK)

TERMOHON

NO	NAMA FORM / AKTA
1	Akta Pengajuan Jawaban Termohon (APJT)
2	Daftar kelengkapan Jawaban Termohon (DKJT)
3	Penyampaian Salinan Permohonan
4	Tanda Terima Tambahan Berkas Termohon (T3B)

PIHAK TERKAIT

NO	NAMA FORM / AKTA
1	Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait (APKPT)
2	Daftar Kelengkapan Keterangan Pihak Terkait (DK2PT)
3	Penyampaian Salinan Permohonan Pihak Terkait
4	Tanda Terima Tambahan Berkas Pihak Terkait (T3B)

BAWASLU

NO	NAMA FORM / AKTA
1	Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu (APKB)
2	Daftar Kelengkapan Keterangan Bawaslu (DKKB)
3	Penyampaian Salinan Permohonan Bawaslu
4	Tanda Terima Tambahan Berkas Bawaslu (T3B)

b. Pemilihan Umum Anggota DPD

MAHKAMAH

NO	NAMA FORM / AKTA
1	Buku Pengajuan Permohonan Pemohon (BP3)
2	Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)
3	Daftar Pemeriksaan Kelengkapan Pengajuan Pemohon (DPKP3)

PEMOHON

NO	NAMA FORM / AKTA
1	Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3)
2	Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL)
3	Akta Pembatalan Penerimaan Permohonan Pemohon (AP4)
4	Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon (DKPP)

5	Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (DKBP)
6	Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK)
7	Akta Pembatalan Registrasi Perkara (APRP)
8	Tanda Terima Tambahan Berkas (T3B)

TERMOHON

NO	NAMA FORM / AKTA
1	Akta Pengajuan Jawaban Termohon (APJT)
2	Daftar kelengkapan Jawaban Termohon (DKJT)
3	Penyampaian Salinan Permohonan
4	Tanda Terima Tambahan Berkas Termohon (T3B)

PIHAK TERKAIT

NO	NAMA FORM / AKTA
1	Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait (APKPT)
2	Daftar Kelengkapan Keterangan Pihak Terkait (DK2PT)
3	Penyampaian Salinan Permohonan Pihak Terkait
4	Tanda Terima Tambahan Berkas Pihak Terkait (T3B)

BAWASLU

NO	NAMA FORM / AKTA
1	Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu (APKB)
2	Daftar Kelengkapan Keterangan Bawaslu (DKKB)
3	Penyampaian Salinan Permohonan Bawaslu
4	Tanda Terima Tambahan Berkas Bawaslu (T3B)

c. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

MAHKAMAH

NO	NAMA FORM / AKTA
1	Buku Pengajuan Permohonan Pemohon (BP3)
2	Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)
3	Daftar Pemeriksaan Kelengkapan Pengajuan Pemohon (DPKP3)

PEMOHON

NO	NAMA FORM / AKTA
1	Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3)
2	Akta Pembatalan Penerimaan Permohonan Pemohon (AP4)
3	Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon (DKPP)
4	Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK)
5	Akta Pembatalan Registrasi Perkara (APRP)
6	Tanda Terima Tambahan Berkas (T3B)

TERMOHON

NO	NAMA FORM / AKTA
1	Akta Pengajuan Jawaban Termohon (APJT)
2	Daftar kelengkapan Jawaban Termohon (DKJT)
3	Penyampaian Salinan Permohonan
4	Tanda Terima Tambahan Berkas Termohon (T3B)

PIHAK TERKAIT

NO	NAMA FORM / AKTA
1	Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait (APKPT)
2	Daftar Kelengkapan Keterangan Pihak Terkait (DK2PT)
3	Penyampaian Salinan Permohonan Pihak Terkait
4	Tanda Terima Tambahan Berkas Pihak Terkait (T3B)

BAWASLU

NO	NAMA FORM / AKTA
1	Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu (APKB)
2	Daftar Kelengkapan Keterangan Bawaslu (DKKB)
3	Penyampaian Salinan Permohonan Bawaslu
4	Tanda Terima Tambahan Berkas Bawaslu (T3B)

1) Penerimaan Permohonan dan Registrasi Perkara PHPU DPR,DPRD, dan DPD

Permohonan PHPU Legislatif tersebar di seluruh provinsi yaitu 34 Provinsi dan dimohonkan oleh seluruh Partai Politik yaitu 20 Partai Politik, baik partai politik nasional maupun partai politik lokal Aceh. Dalil yang dimohonkan oleh pemohon sebagian besar yaitu mempermasalahkan mengenai pengurangan suara dan penggelembungan suara. Pengurangan suara dan penggelembungan suara yang didalilkan yaitu pengurangan suara dan atau penggelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik kepada perolehan suara antar calon dalam satu partai politik, antar calon antar partai politik, maupun antar partai politik. Selain itu, pelanggaran administrasi pemilu juga menjadi dalil yang banyak dalam permohonan perselisihan pemilihan umum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Dari 340 permohonan yang masuk untuk perkara PHPU legislatif diregistrasi menjadi 260 Perkara yang didasarkan atas permohonan per provinsi dan per partai politik (termasuk yang diajukan Lembaga Masyarakat) serta perkara Parliamentary Treshold. Sedangkan untuk permohonan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diregistrasi menjadi 1 Perkara dari 1 Permohonan yang diajukan. Pada perkara PHPU Legislatif jumlah Daerah Pemilihan (Dapil) yang dipermasalahkan sebanyak 560 Dapil dan dikoreksi setelah persidangan menjadi 553 Dapil. Secara umum setelah dilakukan pemeriksaan persidangan, Mahkamah Konstitusi memutus PHPU Presiden dan Wakil Presiden dengan amar Ditolak, sedangkan untuk PHPU Legislatif diputus dengan amar 12 Dikabulkan Sebagian, 101 Ditolak, dan 104 Tidak Dapat Diterima, serta 43 Gugur serta ditarik kembali oleh Pemohon.

2) Penerimaan Permohonan dan Registrasi Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden

Permohonan di catat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada Hari Selasa, 11 Juni 2019 pukul 12.30 WIB dengan Nomor Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 01/ARPK-

PRES/PAN.MK/06/209, dengan registrasi perkara Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019.

- 3) Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

NO	TAHAP	KEGIATAN	JADWAL		KET.
			AWAL	AKHIR	
1	Pengajuan Permohonan Pemohon	a.PHPU DPR dan DPRD: Pengajuan Permohonan Pemohon	25 April 2019	25 Mei 2019	(1) Permohonan diajukan kepada Mahkamah paling lama 3 x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.
		b. PHP U DPD: Pengajuan Permohonan Pemohon	25 April 2019	25 Mei 2019	

					(2) Menyesuaikan waktu pengumuman penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU.
		c.PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Pengajuan Permohonan Pemohon	23 Mei 2019	25 Mei 2019	(1) Permohonan diajukan kepada Mahkamah dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU. (2) Menyesuaikan waktu pengumuman penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU (3) Permohonan online diberikan

					tanda terima online.
		d. PHP U DPR dan DPRD: Penyampaian AP3 kepada Pemohon	25 April 2019	25 Mei 2019	
		e. PHPU DPD: Penyampaian AP3 kepada Pemohon	25 April 2019	25 Mei 2019	
2	Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon	a. PHPU DPR dan DPRD: Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon	25 April 2019	27 Mei 2019	
		b. PHPU DPD: Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon	25 April 2019	27 Mei 2019	
		c. PHPU DPR dan DPRD: Penyampaian APBL kepada Pemohon	25 April 2019	28 Mei 2019	
		d. PHPU DPD: Penyampaian APBL kepada Pemohon	25 April 2019	28 Mei 2019	
3	Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon	a. PHPU DPR dan DPRD: Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon	26 April 2019	31 Mei 2019	Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh
		b. PHPU DPD: Perbaikan dan	26 April 2019	31 Mei 2019	

		Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon			empat) jam sejak APBL diterima Pemohon.
		c.PHPU DPR dan DPRD: Penyerahan Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon	26 April 2019	31 Mei 2019	
		d.PHPU DPD: Penyerahan Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon	26 April 2019	31 Mei 2019	
		a.PHPU DPR dan DPRD: Pencatatan dalam BRPK	1 Juli 2019	1 Juli 2019	Penyelesaian perkara selama 30 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK
4	Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK	b.PHPU DPD: Pencatatan dalam BRPK	1 Juli 2019	1 Juli 2019	
		c.PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Pencatatan dalam BRPK	11 Juni 2019	11 Juni 2019	(1) Permohonan dapat dicatat lebih awal dalam BRPK menyesuaikan dengan penetapan KPU (2) Penyelesaian perkara selama 14

					hari kerja sejak BRPK
		d.PHPU DPD: Penyerahan Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon	1 Juli 2019	1 Juli 2019	
		e.PHPU DPD: Penyampaian ARPK kepada Pemohon	1 Juli 2019	1 Juli 2019	
		f. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Penyampaian ARPK kepada Pemohon	11 Juni 2019	11 Juni 2019	
5	Penyampaian Salinan Permohonan dan pemberitahu an sidang pertama kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu	a.PHPU DPR dan DPRD: Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu	1 Juli 2019	2 Juli 2019	
		b.PHPU DPD: Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu	1 Juli 2019	2 Juli 2019	

		c. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu	11 Juni 2019	11 Juni 2019	
		d. PHPU DPR dan DPRD: Pemberitahuan hari sidang pertama	1 Juli 2019	2 Juli 2019	
		e. PHPU DPD: Pemberitahuan hari sidang pertama	1 Juli 2019	2 Juli 2019	
		f. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Pemberitahuan hari sidang pertama	11 Juni 2019	11 Juni 2019	
		g. PHPU DPR dan DPRD: Penyerahan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait	5 Juli 2019	12 Juli 2019	
		h. PHPU DPD: Penyerahan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait	5 Juli 2019	12 Juli 2019	
		i. PHPU Presiden dan	12 Juni 2019	12 Juni 2019	

		Wakil Presiden: Penyerahan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait			
		j. PHPU DPR dan DPRD: Penyampaian Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait kepada Pemohon	5 Juli 2019	12 Juli 2019	
		k. PHPU DPD: Penyampaian Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait kepada Pemohon	5 Juli 2019	12 Juli 2019	
		l. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Penyampaian Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait kepada Pemohon	12 Juni 2019	12 Juni 2019	
6	Pemeriksaan Pendahuluan	a. PHPU DPR dan DPRD: Pemeriksaan Pendahuluan	9 Juli 2019	12 Juli 2019	
		b. PHPU DPD: Pemeriksaan Pendahuluan	9 Juli 2019	12 Juli 2019	

		c. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Pemeriksaan Pendahuluan	14 Juni 2019	14 Juni 2019	
7	Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan	a. PHPU DPR dan DPRD: Perbaikan Jawaban dan Keterangan (jika ada)	11 Juli 2019	26 Juli 2019	
		b. PHPU DPD: Perbaikan Jawaban dan Keterangan (jika ada)	11 Juli 2019	26 Juli 2019	
		c. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Perbaikan Jawaban dan Keterangan (jika ada)	13 Juni 2019	13 Juni 2019	
8	Pemeriksaan Persidangan	a. PHPU DPR dan DPRD: Pemeriksaan saksi dan alat bukti	15 Juli 2019	30 Juli 2019	
		b. PHPU DPD: Pemeriksaan saksi dan alat bukti	15 Juli 2019	30 Juli 2019	
		c. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Pemeriksaan saksi dan alat bukti	17 Juni 2019	21 Juni 2019	
9	Rapat Permusyawaratan Hakim	a. PHPU DPR dan DPRD: Rapat Permusyawaratan Hakim	31 Juli 2019	5 Agustus 2019	

		b.PHPU DPD: Rapat Permusyawar ahan Hakim	31 Juli 2019	5 Agustu s 2019	
		c.PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Rapat Permusyawar ahan Hakim	24 Juni 2019	27 Juni 2019	
10	Sidang Pengucapan Putusan	a.PHPU DPR dan DPRD: Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.	6 Agustu s 2019	9 Agustu s 2019	
		b.PHPU DPD: Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.	6 Agustu s 2019	9 Agustu s 2019	
		c.PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	6 Agustu s 2019	9 Agustu s 2019	
11	Penyerahan Salinan Putusan dan Pemuatan dalam laman	PHPU DPR dan DPRD: Penyerahan Salinan Putusan Perkara Perselisihan	6 Agustu s 2019	14 Agustu s 2019	

		Hasil Pemilihan Umum			
		PHPU DPD: Penyerahan Salinan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	6 Agustus 2019	14 Agustus 2019	
		PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Penyerahan Salinan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	28 Juni 2019	2 Juli 2019	

4) Persidangan PHPU DPR, DPRD, dan DPD

- a. Persidangan Pendahuluan;
- b. Pemeriksaan Persidangan;
- c. Putusan Sela;
- d. Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan),
- e. Alat Bukti.

5) Persidangan PHPU Presiden dan Wakil Presiden

- a. Persidangan Pendahuluan;
- b. Sidang Pemeriksaan Persidangan;
- c. Sidang Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli Pemohon serta Pengesahan Alat Bukti (Tambahan) Pemohon,

d. Sidang Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli Pihak
Terkait serta Pengesahan Alat Bukti (Tambahan) Pihak
Terkait, dan Bawaslu

6) Putusan Akhir PHPU DPR,DPRD, dan DPD

Pada sidang pembacaan putusan/ketetapan pada tanggal 6 – 9 Agustus 2019 terdapat 2 jenis putusan akhir yaitu Putusan dan Ketetapan dengan rincian Putusan sebanyak 217 Putusan atau 83% dan Ketetapan sebanyak 43 Putusan atau 17% dari keseluruhan perkara. Untuk amar Ketetapan yaitu sebanyak 33 Putusan yang menyatakan Gugur dan 10 Putusan yang menyatakan Ditarik. Sedangkan amar Putusan yaitu 12 Putusan menyatakan dikabulkan sebagian, 61 putusan menyatakan ditolak seluruhnya, dan 40 putusan menyatakan ditolak sebagian (terdapat dapil yang tidak diterima, gugur, dan ditarik), serta 104 putusan yang menyatakan tidak dapat diterima. Jika kategori Putusan Ditolak Seluruhnya dan Putusan Ditolak Sebagian digabungkan menjadi satu kategori Putusan Ditolak maka, 12 Putusan menyatakan dikabulkan sebagian, 101 putusan menyatakan ditolak dan 104 putusan yang menyatakan tidak dapat diterima. Apabila dilihat dari Dapil yang dipermasalahkan dalam setiap perkara, maka dari 553 Dapil, jumlah Dapil yang dikabulkan sebanyak 12 Dapil,

Ditarik Kembali 37 Dapil, Ditolak 200 Dapil, Gugur 43 Dapil dan Tidak Dapat Diterima sebanyak 261 Dapil.

- Pada Putusan per Dapil DPR RI sebanyak 5 Dapil dinyatakan ditarik kembali, 23 Ditolak, 7 Gugur, dan 33 Dapil dinyatakan Tidak Dapat Diterima.
- Pada Putusan per Dapil DPRD Provinsi sebanyak 4 Dapil dinyatakan dikabulkan, 11 Ditarik Kembali, 37 Dapil Ditolak, 4 Gugur, dan 46 Tidak Dapat Diterima.
- Pada Putusan per Dapil DPRD Kabupaten Kota sebanyak 8 Dapil dinyatakan dikabulkan, 21 Ditarik Kembali, 134 Dapil Ditolak, 32 Gugur, dan 176 Tidak Dapat Diterima.
- Pada Putusan per Dapil DPD RI dimana Dapil pada perkara DPD adalah wilayah provinsi sebanyak 6 dinyatakan ditolak dan 4 dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

7) Putusan Akhir PPHU Presiden dan Wakil Presiden

Dalam Putusan PPHU Pilpres 2019 terhadap dalil Pelanggaran TSM, mahkamah memiliki pertimbangan yang secara garis besar sebagai berikut :

1. Mahkamah tidak menemukan fakta yang menunjukkan adanya intimidasi dan pengaruhnya terhadap perolehan suara;

2. Pemohon tidak membuktikan secara terang apakah hal-hal yang didalilkan tersebut benar-benar terbukti memengaruhi suara pemilih;
3. Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya, terlepas dari apa pun keputusannya;
4. Bukti tidak menerangkan apapun terkait TSM, apalagi pengaruhnya terhadap perolehan suara;
5. Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan perihal kebenaran tentang terjadinya keadaan atau peristiwa yang didalilkan Pemohon;
6. Bukan subjek hukum dan tidak adanya kasualitas dengan perolehan suara;
7. Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan terkait jenis kotak yang dibuka.

Sedangkan dalil mengenai Pelanggaran Administratif Pemilu, mahkamah memiliki pertimbangan yang secara garis besar sebagai berikut :

1. Mahkamah tidak memperoleh keyakinan perihal apakah terhadap peristiwa tidak tergemboknya kotak-kotak suara tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu setempat;
2. Pemohon juga tidak menjelaskan hubungan peristiwa dengan perolehan suara;

3. Dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti yang relevan dengan substansi;
4. Surat suara yang sudah tercoblos telah dinyatakan sebagai surat suara yang rusak, maka tidak memengaruhi perolehan suara;
5. Bukti video tidak menjelaskan apapun yang berkait dengan dalil;
6. Beberapa permasalahan atau kejadian yang didalilkan Pemohon telah diselesaikan melalui mekanisme hukum Pemilu;
7. Beberapa permasalahan yang didalilkan telah dijawab, dan atau ditindaklanjuti Bawaslu;
8. Beberapa permasalahan yang didalilkan telah ditindaklanjuti oleh KPU (Termohon);
9. Beberapa permasalahan tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu;
10. Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa peristiwa yang terkait dengan dalil Pemohon;
11. Bukti tidak diserahkan ke mahkamah.

ORIGINAL

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Bambang, S. (2021). *TINDAK PIDANA PEMILU PADA SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Bambang, S., Setyadji, S., & Darmawan, A. (2021). Penanganan Tindak Pidana Pemilu dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(2), 281–291.
- Fahmi, K. (2016). Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 264–283.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.
- Pemilihan umum legislatif Indonesia*. (2019).
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legis.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu*. (2018).
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum*. (2018).
- Perbawa, S. L. P. (2019). Penegakan hukum dalam pemilihan umum. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), 80–102.
- Prakoso, D. (1987). *Tindak Pidana Pemilu*. Rajawali Pers.
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Santoso, T. (2011). *Penanganan pelanggaran pemilu*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Topo Santoso, dkk. (2006). *Penegakan hukum pemilu: praktik pemilu 2004, kajian pemilu 2009-2014*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. (2017).
- Wijayanta, T., & Firmansyah, H. (2018). *Perbedaan pendapat*

dalam putusan pengadilan. Media Pressindo.

- Prakoso, Djoko, 1987, Tindak Pidana Pemilu, Sinar Harapan, Jakarta.
- Topo Santoso, dkk., 2006, Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014, Jakarta, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi.
- Subekti Nanang, Yuni Sandrawati, Maria Ulfah Kusumaastuti, Syarief Hidayatullah Az Zaky, Melati Kusuma Wardani, Yogi Djatnika, Debby Yelviona, Fithatue Amalia Fatla Aini, Intan Permata Putri, 2019, Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Angka, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Riwanto Agus, Astuti Usman, Faisal Riza, Fritz Edward Siregar, Heru Cahyono, Hifdzil Alim, Jaharudin Umar dkk, Mohammad, Muhammad Yasin, Ratna Dewi Pettalolo, Ruhemansyah, Thomas Wakano, 2019, Perihal Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019), Jakarta, Bawaslu Republik Indonesia.
- Pujiatmiko, Sri Sugeng, 2020, Penanganan Pelanggaran Pemilu (Dalam Teori dan Praktik), Tuban, Karya Litera Indonesia.

Sumber Internet :

- Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2019 , tanggal 7 April 2021.
- Penetapan Hasil Pemilu 2019, diakses dari <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/penetapan-hasil-pemilu-2019?lang=1?lang=1?lang=1> , tanggal 7 April 2021.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014, diakses dari https://www.bphn.go.id/data/documents/7.7._perkara_nomo

[r 14-puu-2013 23 jan 2014 pemilu presiden \(.pdf](#) ,
tanggal 7 April 2021.

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019” diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2019&id=5> , tanggal 7 April 2021.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum, diakses dari <https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu>, tanggal 7 April 2021.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, diakses dari <https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/perbawaslu.html>, tanggal 7 April 2021.

Alur Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum, diakses dari <https://bawaslu.go.id/id/alur-pola-penanganan-pelanggaran-pemilu-umum>, tanggal 7 April 2021.

Alur Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum, diakses dari <https://bawaslu.go.id/id/alur-pola-penanganan-pelanggaran-tindak-pidana-pemilu-umum>, tanggal 7 April 2021.

Form dan Akta Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2019&id=3>, tanggal 7 April 2021.

Alur Sengketa Proses Pemilihan Umum Di PTUN, diakses dari <https://www.ptun-bandung.go.id/assets/dokumen/alur%20proses%20sengketa%20pemilu.pdf>, tanggal 7 April 2021

Sumber Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi;

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden;

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Presiden Dan Wakil Presiden;

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hakim Khusus Dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum,

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.